

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Pustaka	22
1. Bencana, Krisis, dan Keadaan Darurat	22
a. Bencana	23
b. Krisis	25
c. Keadaan Darurat	26
2. Tata Kelola Penanggulangan Bencana	28
3. Lembaga Negara dan Lembaga Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	30
a. Lembaga Negara	30
b. Lembaga Penyelenggara Penanggulangan Bencana	31
B. Landasan Teori	32
1. Politik Hukum	33
2. Kelembagaan	35

a. Pembagian Kekuasaan dan Hubungan Antar Lembaga	35
b. <i>Single Agency</i> dan <i>Multi Agency</i>	38
c. Reorganisasi Lembaga Pemerintah	40
3. <i>Collaborative Crisis Governance</i>	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	46
B. Bahan Penelitian	47
C. Alat Penelitian	50
D. Jalannya Penelitian	52
E. Analisis Hasil Penelitian	53
F. Hambatan Penelitian	55
BAB IV HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Perkembangan Pengaturan Dan Dinamika Keterlibatan Lembaga-Lembaga Dalam Kelembagaan Penyelenggara Penanggulangan Bencana Di Indonesia Dari Waktu Ke Waktu.....	61
1. Sejarah Perkembangan Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Penanggulangan Bencana di Indonesia	61
a. Keputusan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)	63
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya dan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan “Regeling Po de Staat Van Oorlog en Beleg” dan Penetapan “Keadaan Bahaya”.....	65
c. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1961	73
d. Keputusan Presiden Nomor 312 Tahun 1965	75
e. Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966 dan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 14/U/KEP/1967	76
f. Surat Keputusan Nomor 162/KOTI/1965	79
g. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam	81

h. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.....	85
i. Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana	88
j. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi	90
k. Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi	93
l. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana	94
m. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perpres No. 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perpres No. 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana	100
n. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	101
2. Dinamika Keterlibatan Lembaga-Lembaga dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Indonesia dari Waktu ke Waktu.....	111
B. Realitas Hukum Dari Banyaknya Lembaga Yang Terlibat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Indonesia	118
C. Bentuk Hubungan Kelembagaan yang Ideal dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Indonesia	162
1. Sistem Kelembagaan Penyelenggara Penanggulangan Bencana dan Contoh Praktik Penerapannya.....	164
a. Sistem <i>Single-Agency</i> dan Penerapannya di Amerika Serikat.....	164

b. Sistem <i>Multi-Agency</i> dan Penerapannya di China.....	177
2. Opsi Sistem Kelembagaan Penyelenggara Penanggulangan Bencana yang dapat Digunakan di Indonesia	192
a. Opsi untuk Menggunakan Sistem <i>Single-Agency</i>	197
b. Opsi untuk Menggunakan Sistem <i>Multi-Agency</i>	204
c. <i>Collaborative Crisis Governance</i>	210
BAB V PENUTUP	229
A. Kesimpulan	229
B. Saran	232
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Konsep CATWOE Bencana	60
Gambar 2.	Skema <i>Early Warning System</i> untuk Bencana Gempa Bumi dan Tsunami berdasarkan Perpres 93/2019	130
Gambar 3.	Struktur Organisasi <i>Department Homeland and Security</i> , Amerika Serikat	199
Gambar 4.	Skema Sederhana Kelembagaan Penyelenggara Penanggulangan Bencana dengan Sistem <i>Single-Agency</i>	200
Gambar 5.	Skema Kelembagaan dengan Sistem <i>Multi-Agency</i>	205
Gambar 6.	Skema Gabungan dari Skema Sentralisasi dan Skema Perantara	208
Gambar 7.	Skema dalam Menjalankan Sistem <i>Collaborative Crisis Governance</i>	222

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perkembangan Lembaga Penyelenggara Penanggulangan Bencana di Indonesia	106
Tabel 2.	Keterlibatan Lembaga Negara dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	115
Tabel 3.	Tren Kejadian Bencana di Indonesia (2019-2023)	123
Tabel 4.	Analisis SWOT terhadap Masing-masing Opsi Sistem Kelembagaan	223